

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI
BELANJA DAERAH DI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2011-2015
(Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Widyaswari Kusuma Ningrum
Nomor Mahasiswa : 14313295
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI
BELANJA DAERAH DI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2011-2015

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Widyaswari Kusuma Ningrum
Nomor Mahasiswa : 14313295
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis,

Widyaswari Kusuma Ningrum

PENGESAHAN

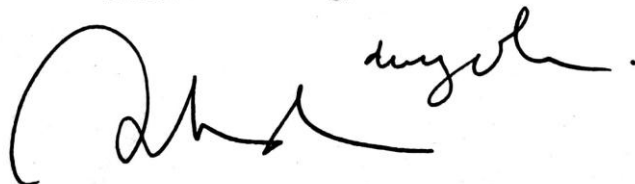
**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di
Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015**

Nama : Widyaswari Kusuma Ningrum
Nomor Mahasiswa : 14313295
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sahabudin Sidiq', with a stylized flourish at the end.

Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2015**

Disusun Oleh : WIDYASWARI KUSUMA NINGRUM

Nomor Mahasiswa : 14313295

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 13 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.



Penguji : Awan Setya Dewanta, Drs .,M.Ec.Dev.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama (Djulin Setija Budi dan Arwiyah), yang selama ini telah memberikan dukungan terbaik, doa, dan segala upaya maksimal untuk penulis.
2. Kakak perempuan saya, Roridiar Novita Fatmasari
3. Untuk almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, terutama Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi, yang memberikan banyak ilmu bermanfaat selama ini.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Ash-Sharh: 5,6)

Man Jadda Wa Jadda

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Orang tua tercinta, Djulin Setija Budi dan Arwiyah yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan dukungan yang berlimpah.
3. Kakak dan adik-adik tercinta, Roridiar Novita Fatmasari, Clara Julia Davis, Dean Bryon Davis, dan Alyssa Tiara Davis yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan dukungan yang berlimpah.

4. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan serta bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh dosen dan Staf Karyawan UII Yogyakarta yang selama ini telah membimbing dan mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus dan ikhlas.
7. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, Zuhdi, Dena, Eza, David. Terimakasih atas dukungan dan doanya.
8. Sahabat-sahabat yang selalu membantu, mendukung dan menemani penulis sejak awal kuliah hingga saat ini, Iklal, Arin, Nurul.
9. Teman-teman KKN Unit 47, Dina, Maya, Yusuf, Hanif, Hafiz, Rio, Haidar. Terimakasih atas doa dan dukungannya.

Akhirnya, penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan dapat memanfaatkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis,

Widyaswari Kusuma Ningrum

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Berita Acara Skripsi.....	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Tabel	xiii
Halaman Lampiran.....	xiv
Halaman Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Penelitian Terdahulu	10

2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1 Aggaran Daerah	13
2.2.2 Alokasi Anggaran Belanja Daerah.....	15
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah	18
2.2.4 Dana Transfer (Dana Desa).....	21
2.2.5 Penduduk (Populasi)	23
2.3 Hubungan Antar Variabel	25
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	25
2.3.2 Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Daerah	26
2.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah	27
2.4 Kerangka Pemikiran.....	28
2.5 Hipotesis.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel	31
3.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	31
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	31
3.3.1 Variabel Penelitian	31
3.3.2 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.3.3 Metode Penelitian.....	34
 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Deskriptif Data	38
4.2 Pemilihan Model Regresi	38
4.2.1 Pengujian Menggunakan <i>Common Effect Models</i>	38

4.2.2 Pengujian Menggunakan <i>Fixed Effect Models</i>	39
4.2.3 Pengujian Menggunakan <i>Random Effect Models</i>	41
4.3 Pemilihan Model Regresi Yang Tepat	43
4.4 Evaluasi Regresi.....	45
4.4.1 Uji Kebaikan garis Regresi (R-squared)	46
4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)	47
4.4.3 Uji Signifikansi (Uji t)	47
4.5 Intercept.....	50
4.6 Pembahasan.....	50
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	50
4.6.2 Dana Desa Terhadap Belanja Daerah	52
4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah	53
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Implikasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap	4
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap	4
Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum di Kabupaten Cilacap	5
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap	5
Tbel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Hasil estimasi <i>Common Effect Models</i>	39
Tabel 4.2 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Models</i>	40
Tabel 4.3 Hasil Estimasi <i>Random Effect Models</i>	42
Tabel 4.4 Hasil <i>Uji Chow</i>	44
Tabel 4.5 Hasil <i>Uji Hausman</i>	45
Tabel 4.6 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Models</i>	45
Tabel 4.7 Intercept	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Data Regresi Pengujian Data Panel	60
Lampiran 2 <i>Common Effect Models</i>	64
Lampiran 3 <i>Fixed Effect Models</i>	65
Lampiran 4 <i>Random Effect Models</i>	66
Lampiran 5 <i>Uji Chow</i>	68
Lampiran 6 <i>Uji Hausman</i>	68

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Desa), Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 Kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang diperoleh melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki data dari 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* dengan waktu penelitian tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diuji, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dana Transfer (Dana Desa) dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Desa), Jumlah Penduduk, Regresi Data Panel

ABSTRACT

This study aims to increase the Local Revenue, Village Funds, Population to the Allocation of Regional Expenditure in Cilacap Regency consisting of 24 Districts. The data used in this study is sourced from the local Government of Cilacap Regency obtained through the Agency for Assessment of Financial Management and Regional Assets (BPPKAD) and the Central Bureau of Statistics (BPS) which has data from 24 Districts in Cilacap Regency. The method used in this research is panel data regression method by using Fixed Effect Model method with researching the year from 2011-2015. The results of this study indicate that of the three variables tested, Local Revenue is significantly negative to the Regional Expenditure Allocation. Fund Transfers (Village Funds) and Population significantly positive to Local Expenditure Allocation.

Keywords: Regional Expenditure, Local Original Income, Funds Transfer (Village Funds), Total Population, Panel Data Regression

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan otonomi daerah secara efektif mulai 1 Januari 2001 hingga saat ini, yang merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintahan Kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintahan pusat. Otonomi Daerah diberlakukan agar Pemerintah dapat mandiri, dan tidak tergantung dengan Pemerintah Pusat dalam segala hal, khususnya dalam hal pembiayaan maupun pengelolaan keuangan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemampuan suatu daerah dalam berotonomi.

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Cilacap adalah 2,124.47km², yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Tidak hanya sektor pertanian yang menyumbang pendapatan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Cilacap tetapi terdapat pula sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan yang juga memiliki andil dalam proses pertumbuhan perekonomian Kabupaten Cilacap. Sehingga dengan potensi yang dimiliki tersebut dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang kemudian akan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peran pemerintah daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah serta menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya. Pembangunan tersebut biasanya disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut.

Dalam sistem perekonomian pendapatan atau penerimaan suatu daerah diperoleh melalui hak daerah tersebut untuk memungut pajak, melakukan pinjaman, kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah daerah dan membayar tagihan. Pengeluaran dan penerimaan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah Daerah yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004). Tujuan perancangan APBD adalah agar pemerintah Daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan besaran pengeluaran yang akan dibelanjakan. Terdapat tiga komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah dan

pembiayaan daerah yang sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah. Apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan hasil yang baik pula bagi daerah. Pemerintah seharusnya mampu untuk mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar memberikan manfaat yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan umum.

Kabupaten Cilacap memiliki jumlah realisasi belanja daerah tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015. Adanya alokasi pengeluaran belanja daerah, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan daya tarik daerah dengan peningkatan infrastruktur, perbaikan prasarana transportasi, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar dunia usaha daerah dapat lebih berkembang.

Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 Kecamatan ini memiliki sumber-sumber pendapatan baik dari pendapatan asli daerah ataupun dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer. Berikut data Alokasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Desa), dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011-2015:

Tabel 1.1
Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap

Tahun	Belanja Daerah
2011	37.021.230.869
2012	42.003.894.900
2013	45.874.131.126
2014	54.551.254.320
2015	62.693.801.993

Sumber: Dokumen Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap setiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2011 sebesar 37.021.230.869 dan terus meningkat sampai tahun 2015 sebesar 62.693.801.993. kondisi keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta kemampuan dalam mengolah sumber-sumber keuangan daerah sangat mempengaruhi alokasi belanja daerah itu sendiri.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Belanja Daerah
2011	1.642.523.786
2012	3.043.043.000
2013	1.988.913.863
2014	1.179.706.206
2015	409.214.113

Sumber: Dokumen Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2016

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 sebesar 1.642.523.786 triliun rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 3.043.043.000 triliun rupiah, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2015 sebesar 409.214.113 triliun rupiah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat melanjutkan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang rendah menandakan bahwa pemerintah daerah belum berhasil mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah, sehingga tidak dapat memberikan keuntungan berupa pemasukan dana dari pendapatan asli daerah.

Tabel 1.3
Dana Alokasi Umum di Kabupaten Cilacap
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Belanja Daerah
2011	91.480.720.000
2012	92.230.613.000
2013	94.158.953.000
2014	112.047.698.000
2015	125.640.326.000

Sumber: Dokumen Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2016

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa DAU di Kabupaten Cilacap terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Cilacap terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap
(dalam juta jiwa)

Tahun	Belanja Daerah
2011	1.755.268
2012	1.764.003
2013	1.767.502
2014	1.774.649
2015	1.780.533

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi

Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap. Pada penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa topik tersebut belum pernah dikaji di Kabupaten Cilacap, terlebih secara khusus serta mendetail di setiap kecamatan. Dalam penelitian tersebut, akan dilakukan pengujian serta dilihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Desa), serta Jumlah Penduduk sebagai variabel-variabel yang telah ditentukan di setiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap sejak tahun 2011 sampai dengan 2015, baik pengujian yang dilakukan secara bersamaan maupun pengujian tiap variabel secara individu. Regresi data panel menjadi metode pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah disetiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?
2. Bagaimana pengaruh Dana Transfer disetiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk di setiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, serta Jumlah Penduduk disetiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah disetiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?
2. Menganalisis pengaruh Dana Transfer disetiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk di setiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?
4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, serta Jumlah Penduduk disetiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 hingga 2015?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menyediakan informasi bagi tiap kecamatan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, serta Jumlah Penduduk di setiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap.
2. Memberikan informasi bagi para peneliti lain untuk menambah referensi dalam penelitiannya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, serta Jumlah Penduduk, di setiap Kecamatan terhadap Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap.
3. Menjadi bahan masukkan dalam pembangunan, terutama mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Desa), serta Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.

4. Sebagai bahan bacaan, masukan, serta referensi untuk penelitian lebih lanjut bagi pihak lain yang tertarik dengan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bagian kajian pustaka dan landasan teori akan membahas teori apa saja yang digunakan untuk menganalisis masalah yang hendak diteliti serta untuk menjelaskan teori-teori yang mendukung hipotesis, yang didukung oleh penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian, dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan, alat analisis yang digunakan dalam penelitian, jalan penelitian, variabel yang akan dipelajari serta data yang digunakan, serta analisis hasil yang mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil.

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan uraian data tentang penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang ditentukan sehingga membawa kearah sasaran dan tujuan penelitian.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bagian kesimpulan dan saran akan memuat apakah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran untuk berbagai pihak terkait penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan permasalahan yang diangkat juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya yang mendasari pemikiran penulis dalam menyusun skripsi. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain :

Kurnia (2016) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antar kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah, sedangkan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta karena pemerintah daerah masih bergantung pada pendapatan asli daerah sebagai sumber dana daerah dalam hal alokasi belanja daerah. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terdapat perbedaan pada variabel dan daerah penelitiannya dan daerah penelitiannya, sedangkan persaannya sama-sama meneliti tentang pengaruh belanja di pemerintahan daerah.

Purpitasari (2015) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana

pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak, retribusi perusahaan milik daerah dan lain-lain merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Begitu juga dengan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana dana alokasi umum (DAU) merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terdapat perbedaan pada variabel dan daerah penelitiannya dan daerah penelitiannya, sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang pengaruh belanja di pemerintahan daerah.

Devita (2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di provinsi Jambi. Ketika diamati dari pengaruhnya dengan menggunakan model fixed effect, dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Perbedaan penelitian kali ini adalah terdapat perbedaan pada daerah penelitiannya, sedangkan persamaannya yaitu sama dalam variabel dan meneliti tentang pengaruh belanja di pemerintahan daerah.

Ahmad (2013) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja. Perbedaan dengan penelitian kali ini

adalah terdapat perbedaan dalam variabel dan lokasi penelitiannya, sementara persamaannya adalah sama-sama meneliti pengaruh belanja terhadap daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul, Penulis & Tahun	Hasil
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antar kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2007-2015 (Kurnia, 2016).	Metode Analisis: Regresi Data Panel Hasil Penelitian: PDRB, jumlah penduduk, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah, sedangkan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terdapat alokasi belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009-2013, (Purpitasari, 2015).	Metode Analisis: Regresi Data Panel Hasil Penelitian: Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, (Devita, 2014)	Metode Analisis: Regresi Data Panel Hasil Penelitian: PAD dan DAU secara simultan&parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung , jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung.
Pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, (Amrozi Ahmad, 2013).	Metode Analisis: Regresi Data Panel Hasil Penelitian: Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pegawai, tetapi untuk belanja modal berpengaruh negatif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997). Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun. Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) sebagai berikut:
 - a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

b. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

d. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

e. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang

telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda.

2.2.2. Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002). Proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda.

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu belanja selain modal (belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja transfer, belanja tak terduga) dan belanja modal. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:

a. Belanja administrasi umum

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja pegawai, merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan, merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Operasi

Merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja Pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik), merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk

orang atau personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik), merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik), merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik
4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Darise (2009) mengemukakan, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

1. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 2. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
 3. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan

Pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari danaperimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi,2007).

2.2.4 Dana Transfer (Dana Desa)

Dana Transfer (Dana Desa) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan berasal dari APBN. Tujuan diberikannya dana ini adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebutuhan akan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan juga potensi daerah (UU No 33 Tahun 2004). Adapun kebutuhan daerah ini dicerminkan dengan faktor luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan untuk kapasitas fiskal dicerminkan dengan faktor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Provinsi dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakosa, 2004). Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

2.2.5 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dampak adanya batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer menyerap berbagai pengaruh dari kreativitas manusia.

Teknologi dan organisasi dapat dikelola dan ditingkatkan guna memberi jalan bagi era baru pembangunan ekonomi. Dengan demikian strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan baik antara umat manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu. Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain adalah (Tjiptoherijanto, 2002):

1. Penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan

bahwa penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

2. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.
3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang selama 25 tahun ke depan atau satu generasi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang, 25 tahun setelah tahun 1997. Demikian

pula, hasil program keluarga berencana yang dikembangkan 30 tahun yang lalu (1968), baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan nasional sama artinya dengan menyengsarakan generasi berikutnya.

Perhatian pemerintah terhadap kependudukan dimulai sejak pemerintah Orde Baru memegang kendali. Konsep pembangunan manusia seutuhnya yang tidak lain adalah konsep pembangunan kependudukan mulai diterapkan dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah sejak Repelita 1 pada tahun 1986. Namun sedemikian jauh, walaupun dalam tatanan kebijaksanaan telah secara sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan, pemerintah nampaknya belum dapat secara optimal mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijaksanaan tersebut. Jargon pembangunan berwawasan kependudukan sudah lama didengar dalam bentuk dan format lain, namun masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sudah lama didengung-dengungkan mengenai penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan, jargon mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, atau pembangunan bagi segenap rakyat. Sudah saatnya jargon tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh jika tidak ingin mengalami krisis ekonomi yang lebih hebat lagi di masa mendatang.

2.3 Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Hubungan PAD Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana PAD berarti semakin besar juga belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan tujuan pembangunan di daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pemasukan terhadap keuangan daerah. Sehingga, apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah semakin besar, akan mempengaruhi besaran belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2.3.2 Hubungan Dana Desa Terhadap Belanja Daerah

Dana Transfer (Dana Desa) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran setiap daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan diterimanya Dana Desa, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menggunakan dana tersebut seperti memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dana Desa menjadi sumber penerimaan selain PAD, pemberian Dana Desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada besar kecilnya kebutuhan suatu daerah atau bisa dikatakan pemberian dana alokasi umum bersifat *block grant*. Semakin besar Dana Desa yang diterima oleh daerah, maka semakin besar belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.3.3 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Selain dikatakan sebagai faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, penduduk juga dapat dikatakan sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah perlu mengetahui perkembangan jumlah penduduk pada setiap daerah, baik menurut angkatan kerja, lapangan kerja, berdasarkan kelompok umur serta pendidikan, berdasarkan kabupaten/kota dan lainnya agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan.

Kebijakan yang dimaksudkan tentunya sebagai perencanaan pembangunan, sehingga terciptanya tujuan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adam Smith menyatakan prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah yang disebut dengan *Canon or Government Expenditure*, terdiri dari:

1. Asas moralita, yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai nilai yang di junjung tinggi oleh suatu bangsa yaitu agama.
2. Asas nasionalitas, pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional.
3. Asas kerakyatan, pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
4. Asas fungsionalita, pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan.
5. Asas rasionalita, pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran.

6. Asas perkembangan, pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan perkembangan negara dan dunia.
7. Asas keseimbangan dan keadilan, harus ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian.

2.3 Kerangka Pemikiran

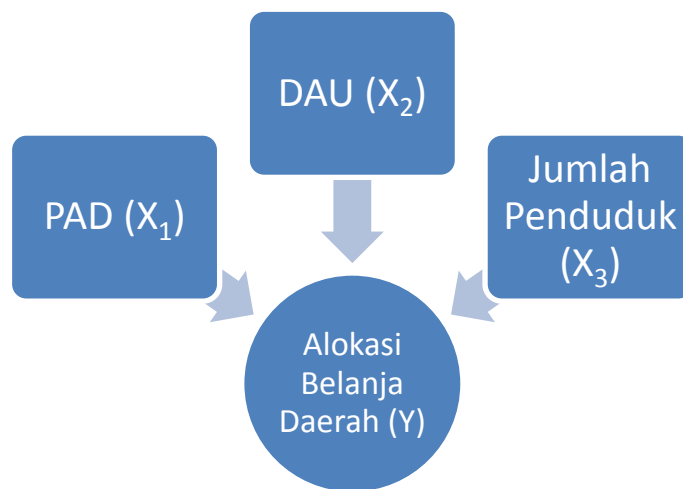
Kesuksesan suatu daerah dalam menjalankan dan membiayai roda pemerintahan maupun pembangunan di daerah menuju suatu kemandirian dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun. Sumber-sumber pendapatan tersebut dapat berasal dari Pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD atau pengelolaan kekayaan daerah, maupun pendapatan lain-lain yang dianggap sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi tingkat PAD per tahun menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut secara baik guna percepatan pembangunan di daerah.

Kondisi nyata menunjukkan bahwa banyak daerah saat ini yang kurang mampu membiayai roda pemerintahan maupun pembangunan di daerah disebabkan karena kecilnya PAD dari daerah tersebut. Hasil akhirnya pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan di daerah lebih banyak menunggu adanya bantuan dari pemerintah pusat (DAU). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena

itu tidaklah mengherankan bahwa daerah-daerah yang minim atau kecil pendapatan asli daerahnya sering menjadi daerah-daerah yang terbelakang dan kurang disentuh oleh suatu kemajuan, karena hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah untuk belanja daerahnya.

Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya juga berpengaruh terhadap belanja daerah. yang harus dikeluarkan untuk pembangunan daerah. sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk. Pembangunan di suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila kesejahteraan penduduk meningkat dalam arti luas.

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah antar Kecamatan di Kabupaten/Kota Cilacap periode 2011-2015.
2. Diduga Dana Transfer berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah antar Kecamatan di Kabupaten/Kota Cilacap periode 2011-2015.
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah antar Kecamatan di Kabupaten/Kota Cilacap periode 2011-2015.
4. Diduga PAD, Dana Transfer, Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Cilacap periode 2011-2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menjadi populasi yang digunakan. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap dengan kriteria sebagai berikut :

1. Seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mempublikasikan laporan Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2011-2015.

3.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2015”, melakukan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian menjadi langkah pertama yang dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Cilacap.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Dikutip dari Sugiyono (2008), variabel penelitian dikatakan sebagai segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dijadikan sebagai dasar

pada suatu penelitian yang dipelajari untuk diambil informasi dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2015 ini terdapat dua variabel yang dibahas dalam penelitian, yaitu variabel dependen (variabel terikat) serta variabel independen (variabel bebas)

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi akibat adanya perubahan ditimbulkan oleh variabel independen (variabel bebas). Sedangkan variabel independen (variabel bebas) merupakan yang membawa pengaruh atau menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel dependen (variabel terikat). Pendapatan Asli Daerah sebagai X_1 , Dana Transfer sebagai X_2 , Jumlah Penduduk sebagai X_3 menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja dana bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, serta belanja bantuan sosial termasuk dalam Belanja tidak langsung. Sementara belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal termasuk dalam belanja langsung.

1. Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja bunga, belanja subsidi,

belanja bunga, belanja hibah, belanja dana bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, serta belanja bantuan sosial termasuk dalam Belanja tidak langsung. Sementara belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal termasuk dalam belanja langsung.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan semua penerimaan di daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu Pajak Daerah (bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan sebagainya), Retribusi Daerah (bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi air, retribusi kelebihan muatan, dan sebagainya), Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (dapat berupa penerimaan dari BPD, dividen dari BPR dan BKK, perusahaan daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (berupa hasil dari penjualan aset milik daerah, serta penerimaan dari jasa giro).
3. Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan atau dialokasikan kepada tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Dana Perimbangan biasanya dapat disebut juga sebagai *grants* atau dana transfer. Hal ini menunjukkan konsekuensi dari ketidakmerataan ekonomi serta keuangan daerah. Dijelaskan pula dalam pengertian seputar Dana Alokasi Umum bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana yang diberikan antara tingkat pemerintahan. Tujuan dari dana transfer itu sendiri guna menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang terjadi serta pemeratakan kemampuan fiskal antara satu daerah

dengan daerah lain sehingga dana alokasi umum tiap daerah akan berbeda (Munir, 2003).

4. Jumlah Penduduk merupakan banyaknya penduduk disuatu wilayah atau daerah yang dihitung berdasarkan sensus penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap disuatu daerah serta tercatat secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah bersangkutan. Jumlah penduduk dapat juga diartikan sebagai jumlah orang di suatu daerah tertentu pada radius 1 km.

3.4 Metode Penelitian

Proses mengurutkan data menurut kategori, pola, serta satuan dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja dari suatu penelitian disebut sebagai Analisis data. Makna lain dari analisis data yaitu suatu proses yang penting dalam dalam suatu penelitian sebab analisis data digunakan sebagai penarik kesimpulan pada suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menjadi populasi yang digunakan guna menunjang penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Cilacap.

Penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015, data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* menjadi metode pengolahan data yang digunakan. Data tahunan selama tahun 2011 hingga 2015

digunakan sebagai data *time series* dalam penelitian ini. Sementara 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap menjadi data *cross section* dalam penelitian ini.

Baltagi (2008) mengemukakan bahwa dibandingkan dengan data *time series* ataupun *cross section*, data panel memiliki lebih banyak keunggulan. Alasan tersebut kemudian dijadikan dasar mengapa data panel dipilih menjadi metode dalam mengolah data tersebut. Adapun beberapa kebaikan data panel yaitu:

- a. Informasi yang disajikan lebih lengkap, beragam, derajat yang lebih besar serta lebih efisien diberikan oleh data panel sebagai kombinasi dari dua jenis data yaitu data *time series* dan *cross section*.
- b. Data panel dianggap lebih baik dalam mendeteksi maupun mengukur efek secara sederhana yang tidak dapat diukur oleh *data time series* dan *cross section*.
- c. Data panel dinilai dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atas perusahaan karena unit data yang disajikan dalam penelitian jumlahnya lebih banyak.
- d. Fenomena-fenomena ekonomi yang lebih kompleks, seperti fenomena skala ekonomi dan lain sebagainya dinilai dapat dianalisa dengan lebih baik ketika analisa yang dilakukan menggunakan data panel.

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Terdapat tiga pendekatan yang dilakukan pada estimasi model regresi data panel. Tiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model (CE)*

Dalam regresi data panel, common effect model hanya terdiri dari kombinasi data *time series* dan *cross section* sehingga dapat dikatakan sebagai model yang paling sederhana. Dimensi waktu serta individu tidak diperhatikan dalam model ini. Sehingga dalam berbagai kurun waktu dapat diasumsikan bahwa perilaku data tersebut adalah sama. Pendekatan yang digunakan yaitu *Ordinary Least Square (OLS)* untuk estimasi data panel.

2. *Fixed Effect Model*

Perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya dalam model ini. Untuk estimasi data panel model *Fixed Effect* dapat menggunakan teknik variabel dummy. Untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, teknik ini biasanya digunakan. Perbedaan intersep dapat terjadi karena perbedaan kelola manajerial, budaya kerja, serta insentif, namun slope antar perusahaan sama. Model dengan estimasi ini disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

3. *Random Effect Model*

Pada Random Effect, model ini biasa disebut dengan teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Pada model ini, perbedaan intersep dapat diakomodasi menggunakan error terms tiap perusahaan. Keuntungan dari menggunakan model *Random Effect* yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Estimasi data panel berasumsi dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar individu serta antar waktu.

Terdapat pengujian yang harus dilakukan untuk mendapatkan model yang paling tepat dalam mengelola data panel. Pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow (*Chow test*) merupakan teknik pengujian guna menentukan model manakah yang paling tepat untuk digunakan antara Common Effect model atau Fixed Effect model dalam mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Uji Hausman (*Hausman test*) merupakan teknik pengujian statistik untuk memilih manakah model yang paling tepat digunakan antara *Fixed Effect* model atau *Random Effect* model dalam estimasi data panel.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier digunakan untuk mengetahui model manakah yang terbaik antara model *Random Effect* dan *Common Effect* (OLS). Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji lagrange multiplier (LM).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripsi Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan data gabungan antara *cross section* dan data *time series*. Adapun untuk data *cross section* diambil dari 24 kecamatan yang ada di kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk data *time series* menggunakan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa dan Populasi setiap kecamatan dalam kurun waktu 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen atau penjelas berpengaruh terhadap variabel dependen atau terikat.

4.2 Pemilihan Model Regresi

Dalam model regresi data panel harus dilakukan pengujian untuk memilih model regresi yang tepat digunakan penelitian ini. Dalam melakukan pengujian model dapat dilakukan dengan tiga alternatif metode yaitu metode dengan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Berikut merupakan hasil pengujiannya:

4.2.1 Pengujian Menggunakan Common Effect Models

Dalam pendekatan estimasi ini, intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu. Adanya perbedaan intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (error atau residual).

Persamaan Regresi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$\text{Belanja Daerah} = 817697.2 - 2.132965 \text{ Pendapatan Asli Daerah} + 0.339856 \text{ Dana Desa} - 1.534503 \text{ Jumlah Penduduk}$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

β_0 = koefisien intersep

β_3 = Jumlah Penduduk (JP)

β_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_2 = Dana Transfer (Dana Desa)

Tabel 4.1
Hasil Estimasi Common Effect Models

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/10/18 Time: 09:47
Sample: 1 5
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	817697.2	157607.0	5.188205	0.0000
X1?	-2.132965	0.540466	-3.946533	0.0001
X2?	0.339856	0.027578	12.32333	0.0000
X3?	-1.534503	1.357505	-1.130384	0.2606
R-squared	0.598647	Mean dependent var		2017869.
Adjusted R-squared	0.588267	S.D. dependent var		548422.5
S.E. of regression	351903.0	Akaike info criterion		28.41286
Sum squared resid	1.44E+13	Schwarz criterion		28.50578
Log likelihood	-1700.772	Hannan-Quinn criter.		28.45060
F-statistic	57.67414	Durbin-Watson stat		0.888912
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: hasil perhitungan

4.2.2 Pengujian Menggunakan Fixed Effect Models

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar wilayah sama dalam berbagai kurun waktu.

Persamaan Regresi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$\text{Belanja Daerah} = -12210201 - 1.040669 \text{ Pendapatan Asli Daerah} + \\ 0.357162 \text{ Dana Desa} + 173.2260 \text{ Jumlah Penduduk}$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

β_0 = koefisien intersep

β_3 = Jumlah Penduduk (JP)

β_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_2 = Dana Transfer (Dana Desa)

Tabel 4.2
Hasil Estimasi Fixed Effect Models

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/10/18 Time: 09:50
Sample: 1 5
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12210201	4107617.	-2.972576	0.0038
X1?	-1.040669	0.613714	-1.695691	0.0933
X2?	0.357162	0.052619	6.787703	0.0000
X3?	173.2260	56.97643	3.040310	0.0031
Fixed Effects (Cross)				
_CS--C	3949008.			
_CT--C	-4128332.			
_CU--C	-9484801.			
_JL--C	-4339389.			
_KWT--C	-90863.17			
_BTS--C	1782596.			
_KSG--C	2960010.			
_ADP--C	-1030857.			
_MAOS--C	5071865.			
_SPG--C	-5171522.			
_KRY--C	933004.5			
_BNG--C	-1256636.			
_NSW--C	10196351			
_SDJ--C	1645973.			
_KDJ--C	-3780042.			
_GDM--C	-879331.5			
_PTM--C	4474708.			
_CPR--C	6035268.			
_KRP--C	-5262495.			
_CMG--C	792032.2			

_MJG--C	-928696.0		
_WNJ--C	-733656.9		
_DYL--C	-1952359.		
_KPL--C	1198166.		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.783911	Mean dependent var	2017869.
Adjusted R-squared	0.723499	S.D. dependent var	548422.5
S.E. of regression	288378.9	Akaike info criterion	28.17705
Sum squared resid	7.73E+12	Schwarz criterion	28.80423
Log likelihood	-1663.623	Hannan-Quinn criter.	28.43175
F-statistic	12.97609	Durbin-Watson stat	1.368988
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: hasil perhitungan

4.2.3 Pengujian Menggunakan Random Effect Models

Dalam pendekatan estimasi ini, data panel didasarkan adanya perbedaan intersep dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antar individu atau objek.

Persamaan Regresi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$\text{Belanja Daerah} = 681463 - 1.760999 \text{ Pendapatan Asli Daerah} + 0.365659 \text{ Dana Desa} - 1.537740 \text{ Jumlah Penduduk}$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

β_0 = koefisien intersep

β_3 = Jumlah Penduduk (JP)

β_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_2 = Dana Transfer (Dana Desa)

Tabel 4.3
Hasil Estimasi Random Effect Models

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/10/18 Time: 09:54
Sample: 1 5
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	681463.7	208966.5	3.261114	0.0015
X1?	-1.760999	0.513855	-3.427033	0.0008
X2?	0.365659	0.032449	11.26890	0.0000
X3?	-1.537740	1.986351	-0.774153	0.4404
Random Effects (Cross)				
_CS--C	-195579.9			
_CT--C	-185.7677			
_CU--C	-64208.95			
_JL--C	-129119.0			
_KWT--C	-87509.58			
_BTS--C	-146280.0			
_KSG--C	80684.47			
_ADP--C	163003.9			
_MAOS--C	156092.9			
_SPG--C	165478.6			
_KRY--C	120638.0			
_BNG--C	-22889.01			
_NSW--C	200482.7			
_SDJ--C	41356.77			
_KDJ--C	111608.2			
_GDM--C	52383.30			
_PTM--C	8951.084			
_CPR--C	-210231.3			
_KRP--C	-22230.21			
_CMG--C	-358752.9			
_MJG--C	-135704.4			
_WNJ--C	64947.70			
_DYL--C	-114073.6			
_KPL--C	321137.0			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			192446.9	0.3081
Idiosyncratic random			288378.9	0.6919
Weighted Statistics				
R-squared	0.580796	Mean dependent var		1123344.
Adjusted R-squared	0.569955	S.D. dependent var		458560.7
S.E. of regression	300714.2	Sum squared resid		1.05E+13
F-statistic	53.57166	Durbin-Watson stat		1.166825
Prob(F-statistic)	0.000000			

Unweighted Statistics			
R-squared	0.594088	Mean dependent var	2017869.
Sum squared resid	1.45E+13	Durbin-Watson stat	0.842486

Sumber: hasil perhitungan

Selanjutnya dilakukan pengujian antara *common effect models (CEM)*, *fixed effect (FEM)*, dan *random effect (REM)* untuk mengetahui model yang paling layak untuk digunakan.

4.3 Pemilihan Model Regresi Yang Tepat

Pemilihan model pengolahan data yang digunakan pada sebuah penelitian perlu didasari dari berbagai macam pertimbangan statistik.

1. *Chow Test* (Uji F-statistik)

Dalam pengujian ini terhadap pemilihan model, dimana akan digunakan model estimasi antara *common effect* atau *fixed effect* dengan pengujian terhadap hipotesis:

Ho: Memilih menggunakan model estimasi *common effect*

Ha: Memilih menggunakan model *fixed effect*

Dalam pengujian ini dapat melakukan pengelihan terhadap *cross section f* dan *cross section chi-square*. Ketika *cross section f* lebih besar dari *cross section chi-square*, maka menerima Ho atau sebaliknya maka menerima Ha.

Dari hasil tabel 4.4, didapatkan nilai *cross section f* sebesar 3.466680 dan *cross section chi-square* nya sebesar 74.298152. sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang layak digunakan adalah *fixed effect models*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.466680	(23,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.298152	23	0.0000

Sumber: hasil perhitungan

2. Uji Hausman

Dalam pengujian ini terhadap pemilihan model, dimana akan digunakan model estimasi antara *random effect* atau *fixed effect* dengan pengujian terhadap hipotesis:

Ho: Memilih menggunakan model estimasi *random effect*

Ha: Memilih menggunakan model *fixed effect*

Dalam pengujian ini dapat melakukan pengelihan terhadap *cross section random* dan *cross section chi-square*. Ketika *cross section random* lebih besar dari *cross section chi-square*, maka menerima Ho atau sebaliknya maka menerima Ha.

Dari hasil tabel 4.4, didapatkan nilai *cross section random* sebesar 13.135987 dan *cross section chi-square* nya sebesar 74.298152. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang layak digunakan adalah *fixed effect models*.

Tabel 4.5
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.135987	3	0.0044

Sumber: hasil perhitungan

4.4 Evaluasi Regresi

Tabel 4.6
Hasil Estimasi *Fixed Effect Models*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/10/18 Time: 09:50
Sample: 1 5
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12210201	4107617.	-2.972576	0.0038
X1?	-1.040669	0.613714	-1.695691	0.0933
X2?	0.357162	0.052619	6.787703	0.0000
X3?	173.2260	56.97643	3.040310	0.0031
Fixed Effects (Cross)				
_CS--C	3949008.			
_CT--C	-4128332.			
_CU--C	-9484801.			
_JL--C	-4339389.			
_KWT--C	-90863.17			
_BTS--C	1782596.			
_KSG--C	2960010.			
_ADP--C	-1030857.			
_MAOS--C	5071865.			
_SPG--C	-5171522.			
_KRY--C	933004.5			
_BNG--C	-1256636.			
_NSW--C	10196351			
_SDJ--C	1645973.			
_KDJ--C	-3780042.			
_GDM--C	-879331.5			
_PTM--C	4474708.			
_CPR--C	6035268.			
_KRP--C	-5262495.			

_CMG--C	792032.2		
_MJG--C	-928696.0		
_WNJ--C	-733656.9		
_DYL--C	-1952359.		
_KPL--C	1198166.		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.783911	Mean dependent var	2017869.
Adjusted R-squared	0.723499	S.D. dependent var	548422.5
S.E. of regression	288378.9	Akaike info criterion	28.17705
Sum squared resid	7.73E+12	Schwarz criterion	28.80423
Log likelihood	-1663.623	Hannan-Quinn criter.	28.43175
F-statistic	12.97609	Durbin-Watson stat	1.368988
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: hasil perhitungan

4.4.1 Uji Kebaikan Garis Regresi (R-squared)

Pengujian R^2 atau disebut koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Rentang nilai dari R^2 yaitu antara nol sampai dengan satu. Semakin tinggi R^2 nya, maka semakin baik garis regresinya karena dapat menjelaskan nilai data aktualnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai R^2 nya atau mendekati nol maka garis regresinya semakin buruk (Sriyana, 2014).

Seperti yang tertera pada tabel 4.6, didapatkan angka koefisien determinasi (R^2) 0.783911 atau 78.39%. Artinya sebesar 78.39% variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Jumlah Penduduk) disetiap Kecamatan mempengaruhi variabel dependen (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap. Sedangkan sisanya sebesar 21.61% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama). Apabila probabilitas F-statistic lebih besar dari α maka H_0 diterima atau secara bersama-sama semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas F-statistic lebih kecil dari α maka H_a diterima atau secara bersama-sama semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis:

H_0 : variabel independen tidak berpengaruh signifikan

H_a : variabel independen berpengaruh signifikan

Dari hasil estimasi:

Probabilitas (F-statistic) = 0.000000

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas $< \alpha$ ($0.000000 < 0.1$) maka model signifikan. Artinya menerima H_a atau dapat dikatakan secara bersama-sama variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Jumlah Penduduk) di setiap kecamatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

4.4.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji Signifikansi (Uji T) merupakan pengujian yang dilakukan pada masing-masing variabel independen dengan tujuan untuk mengetahui apakah secara individu variabel-variabel independen tersebut berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistic dengan α .

Ketika probabilitas F-statistic lebih besar dari α , maka H_0 diterima dan menolak H_a . Artinya, variabel independen tersebut secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, ketika probabilitas F-statistic lebih kecil dari α , maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen tersebut secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_0 : variabel independen tidak berpengaruh signifikan

H_a : variabel independen berpengaruh signifikan

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa nilai masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

a. Variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah)

Probabilitas = 0.0933

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas $< \alpha$ ($0.0933 < 0.1$) atau dapat dikatakan menolak H_0 dan menerima H_a . Berarti variabel X_1 berpengaruh signifikan. Artinya variabel X_1 Pendapatan Asli Daerah di 24 Kecamatan Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

b. Variabel X₂ (Dana Transfer)

Probabilitas = 0.0000

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas < α (0.0000 < 0.1) maka variabel X₂ berpengaruh signifikan.

Artinya variabel X₂ Dana Desa di 24 Kecamatan Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

c. Variabel X₃ (Jumlah Penduduk)

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas < α (0.0031 < 0.1) maka variabel X₃ berpengaruh signifikan.

Artinya variabel X₃ Jumlah Penduduk di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

4.5 Intercept

Tabel 4.7

No	Kecamatan	Intercept
1	Cilacap Selatan	-8261193
2	Cilacap Tengah	-16338533
3	Cilacap Utara	-21695002
4	Jeruklegi	-16549590
5	Kawungaten	-12301064.17
6	Bantarsari	-10427605
7	Kesugihan	-9250191
8	Adipala	-13241058
9	Maos	-7138336
10	Sampang	-17381723
11	Kroya	-11277196.5
12	Binangun	-13466837
13	Nusawungu	-2013850
14	Sidareja	-10564228
15	Kedungreja	-15990243
16	Gandrungmangu	-13089532.5
17	Patimuan	-7735493
18	Cipari	-6171933
19	Karangpucung	-17472696
20	Cimanggu	-11418168.8
21	Majenang	-13138897
22	Wanareja	-12943857.9
23	Dayeuhluhur	-14162560
24	Kampung Laut	-11012035

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh PAD adalah -1.040669, t-hitungnya adalah -1.695691 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0933 kurang dari 10% ($P < \alpha$) sehingga secara statistik variabel PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah (Menerima H_a).

Hasil tersebut bertentangan dengan dugaan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Amrozi (2013) menyebutkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan dalam penelitian ini menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap daerah yang berasal dari sumber ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut, kemudian PAD dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan apabila PAD sebagai penerimaan pemerintah daerah di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) mengalami penurunan maka alokasi belanja daerah di Kabupaten Cilacap meningkat, sehingga PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat terjadi karena PAD di Kabupaten Cilacap jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi belanja daerahnya dengan menggunakan sumber dana lainnya seperti dana transfer, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan yang sah lainnya.

Kabupaten Cilacap memiliki PAD yang tidak besar, hal tersebut terjadi karena sektor perekonomian unggulan yang ada di Kabupaten Cilacap banyak yang bersifat *footlose*, sehingga kurang memberikan dampak yang berarti bagi Kabupaten Cilacap. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dari sektor-sektor perekonomian unggulan tanpa mengesampingkan sektor bukan

unggulan dengan merangsang perkembangan sektor potensial lainnya yang ada seperti sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor transportasi dan perdagangan agar dapat menambah PAD, untuk menunjang pemerataan dan pembangunan ekonomi di setiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap.

4.6.2 Pengaruh Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh Dana Desa adalah 0.357162, t-hitungnya adalah 6.787703 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0000 kurang dari 10% ($P < \alpha$) sehingga secara statistik variabel Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (Menerima H_a).

Hasil tersebut sejalan dengan dugaan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Purpitasari (2015), menyebutkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini Dana Desa juga berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya rata-rata data empiris Dana Desa seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan Dana Desa sebagai penerimaan pemerintah daerah di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang,

Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) akan berdampak pada kenaikan alokasi belanja daerah di Kabupaten Cilacap, sehingga Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.

Dana Transfer ini merupakan indikator dari tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Desa yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan, dan begitu juga sebaliknya. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Halim, Abdul 2003). Hal ini disebabkan karena pemerintah cenderung mengalokasikan dana transfer dengan optimal untuk meningkatkan pembangunan daerahnya, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, perbaikan sarana transportasi dan mengurangi kemiskinan. Sehingga diharapkan pembangunan di daerah tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

4.6.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh Jumlah Penduduk adalah 173.2260, t-hitungnya 3.040310 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0031 kurang dari 10% ($P < \alpha$) sehingga secara statistik variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (Menerima H_a).

Hasil tersebut sejalan dengan dugaan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016), menyebutkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini Jumlah Penduduk

juga berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan rata-rata data empiris Jumlah Penduduk seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan Jumlah Penduduk di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) akan berdampak pada kenaikan alokasi belanja daerah di Kabupaten Cilacap, sehingga Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi.

Penduduk berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Semakin banyak penduduk yang menetap di suatu daerah, maka semakin besar pula belanja daerah yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Ini dikarenakan pada jumlah penduduk yang bekerja. Dari hasil diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah tidak lagi bergantung secara keuangan terhadap transfer dana dari pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu untuk meningkatkan belanja langsungnya. Sehingga dapat disimpulkan, penambahan jumlah penduduk dapat meningkatkan pengeluaran belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dengan begitu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah di setiap Kecamatan berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Alokasi Belanja Daerah menurun, atau dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli daerah akan menurunkan Alokasi Belanja Daerah.
2. Dana Transfer (Dana Desa) di tiap kecamatan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Dana Transfer (Dana Desa) di setiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Alokasi Belanja Daerah di tiap Kecamatan juga akan meningkat.
3. Jumlah Penduduk di setiap Kecamatan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada bertambahnya jumlah Alokasi Belanja Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Jumlah Penduduk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan anggaran belanja daerah untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik.

4. PAD, Dana Transfer, dan Jumlah Penduduk disetiap Kecamatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang ada agar dapat menambah PAD untuk menunjang pemerataan dan pembangunan ekonomi di setiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola dengan baik Dana Transfer yang diberikan ke Kecamatan, sebab Dana Transfer merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama dalam pembiayaan Alokasi Belanja Daerah tiap Kecamatan. Namun tidak semua rancangan pengeluaran penting, sehingga diharapkan pemerintah daerah mempertimbangkan terlebih dahulu belanja yang hendak dilakukan agar pengeluaran yang dilakukan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, A.I. 2013. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah”. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No.9, STIESIA Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Cilacap. www.bps.go.id diakses tanggal 22 September 2017.
- Badan Pusat Statistik. Pendapatan Asli Daerah. www.bps.go.id diakses tanggal 22 September 2017.
- Baltagi, B. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*, 3rd Edition, John Wiley & Sons.
- BPPKAD. 2016. Dokumen Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap (*Audited*). 2011-2015.
- Devita, A. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.2 No.2, Universitas Jambi.
- Ghozali, Imam, Arifin S. 1997. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Mujib, Ibnu. (2009), *Proble Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah)*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

- Kurnia, P. 2016. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2007-2015”. *Karya Ilmiah*.
- Madiasmo, 2004. “Optimalisasi Belanja Modal”. Jakarta: Erlangga.
- Purpitasari. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah”. *Jurnal Imlu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 11, STIESIA Surabaya.
- Sriyana, J. 2014. *Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia)*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, ALFABETA.
- UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif).
- Undang-Undang NO. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran I:

Data Regresi Pengujian Data Panel

KECAMATAN	BELANJA DAERAH				
	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Cilacap Selatan	1.241.154.665	1.408.930.700	1.562.817.463	2.218.229.459	1.829.174.108
Cilacap Tengah	1.314.127.736	1.502.208.100	1.609.837.143	1.809.486.335	2.345.051.661
Cilacap Utara	1.364.370.337	1.569.165.200	1.691.349.122	1.914.810.198	2.404.885.143
Jer uklegi	1.547.987.734	1.792.579.000	1.783.352.137	2.016.165.125	2.613.225.363
Kawungaten	1.352.173.213	1.527.649.000	1.776.730.883	1.900.008.672	1.904.991.532
Bantarsari	1.084.359.437	1.246.981.500	1.137.165.997	1.762.744.112	1.679.454.643
Kesugihan	1.917.962.849	2.203.759.000	2.387.964.855	2.839.422.410	3.467.344.506
Adipala	2.164.614.718	2.423.510.500	2.550.906.852	2.880.512.461	3.071.056.370
Maos	1.500.089.935	1.639.465.000	1.957.773.628	2.205.993.403	2.567.981.788
Sampang	1.512.445.845	1.653.920.500	1.827.541.270	2.073.917.765	2.382.194.689
Kroya	2.146.040.589	2.387.235.600	2.468.218.592	2.852.337.892	3.037.390.190
Binangun	1.898.890.660	2.170.176.700	2.408.529.131	2.728.505.285	3.372.426.324
Nusawungu	1.987.134.177	2.262.166.900	2.427.865.542	3.093.167.107	3.846.444.059
Sidareja	1.402.005.402	1.587.862.000	1.525.808.843	1.937.318.431	2.712.838.726
Kedungreja	1.452.202.035	1.666.995.500	1.911.076.096	1.944.214.933	2.352.157.886
Gandrungmangu	1.643.249.298	1.861.321.400	1.843.933.026	2.773.712.987	3.174.840.466
Patimuan	1.189.292.038	1.339.583.200	1.563.226.794	1.752.180.880	2.187.611.268
Cipari	1.328.574.766	1.520.201.000	1.668.343.558	2.123.088.015	2.084.934.819
Karangpucung	1.495.186.051	1.703.513.000	1.966.124.573	2.262.340.662	2.530.880.497
Cimanggu	1.241.182.794	1.452.625.200	1.618.911.496	2.119.062.773	2.484.170.207
Majenang	1.743.903.750	2.015.836.500	2.058.958.278	2.410.084.155	2.682.096.993
Wanareja	1.735.886.230	1.983.236.400	2.027.248.237	2.446.109.195	3.346.327.131
Dayeuhluhur	1.513.396.965	1.645.818.300	2.216.862.301	2.406.294.616	2.461.249.305
Kampung Laut	1.244.999.645	1.439.154.700	1.883.585.309	2.081.547.449	2.155.074.319

Sumber: Dokumen Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap (*Audited*). 2011-2015.

KECAMATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Cilacap Selatan	219.310.930	178.018.000	109.946.325	46.378.050	14.429.775
Cilacap Tengah	205.130.475	144.000.000	218.149.240	86.522.227	36.727.777
Cilacap Utara	202.496.043,00	175.237.000	40.680.975	111.061.205	60.344.150
Jeruklegi	170.032.514	112.400.000	19.988.650	15.839.000	28.243.500
Kawungaten	37.398.896	156.700.000	122.852.896	55.862.376	16.414.604
Bantarsari	52.305.435	111.334.000	96.109.022	50.123.125	8.280.231
Kesugihan	37.063.680	198.060.000	204.581.504	71.097.032	20.678.741
Adipala	72.827.582	162.000.000	136.501.552	70.958.698	8.166.960
Maos	13.902.688	77.430.000	70.308.836	28.471.903	14.236.096
Sampang	15.779.733	76.211.000	55.447.200	23.388.200	12.402.500
Kroya	67.387.499	142.550.000	177.585.300	55.801.750	28.692.850
Binangun	19.188.352	112.202.000	17.396.300	44.877.200	5.387.000
Nusawungu	49.305.050	160.041.000	31.133.400	40.483.825	10.122.800
Sidareja	33.909.000	88.200.000	79.165.000	31.565.500	4.411.200
Kedungreja	42.904.750	149.124.000	50.218.000	32.549.000	11.870.930
Gandrungmangu	66.540.467	135.750.000	21.305.650	57.663.850	3.549.900
Patimuan	61.078.275	67.800.000	38.163.875	19.777.750	8.474.040
Cipari	25.370.125	27.665.000	57.193.875	32.879.000	4.278.500
Karangpucung	58.509.798	151.500.000	52.826.138	53.097.266	34.452.005
Cimanggu	78.950.631	142.075.000	27.526.350	100.133.975	10.268.850
Majenang	63.184.888	232.530.000	200.696.075	71.844.778	23.376.278
Wanareja	26.073.600	160.479.000	119.323.825	59.761.646	28.070.676
Dayeuhluhur	11.355.875	66.737.000	36.601.875	15.280.100	16.334.750
Kampung Laut	12.517.500	15.000.000	5.212.000	4.288.750	0

Sumber: Dokumen Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap (*Audited*). 2011-2015.

KECAMATAN	DANA TRANSFER				
	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Cilacap Selatan	3.550.870.000	3.750.720.000	4.253.750.000	4.336.250.000	5.027.810.000
Cilacap Tengah	3.428.070.000	3.650.500.000	4.080.750.000	4.328.800.000	4029020000
Cilacap Utara	3.625.087.000	3.820.700.000	4.758.850.000	4.397.250.000	5.329.500.000
Jeruklegi	3.930.130.000	3.930.170.000	3.888.090.000	5.717.241.000	6.166.009.000
Kawungaten	3.652.490.000	3.652.950.000	3.670.280.000	3.449.663.000	4.549.243.000
Bantarsari	2.404.100.000	2.418.800.000	2.472.950.000	3.766.030.000	4.258.565.000
Kesugihan	4.812.670.000	4.800.510.000	4.803.430.000	6.707.207.000	6.774.505.000
Adipala	4.716.440.000	4.719.050.000	4.736.920.000	6.486.060.000	6.463.986.000
Maos	2.965.330.000	2.974.490.000	2.942.670.000	3.399.953.000	4.254.264.000
Sampang	2.945.313.000	2.946.003.000	2.922.823.000	3.339.049.000	4.178.117.000
Kroya	5.081.550.000	5.074.170.000	5.098.100.000	5.411.914.000	6.610.769.000
Binangun	5.029.420.000	5.032.440.000	5.010.840.000	6.026.387.000	7.094.980.000
Nusawungu	5.056.800.000	5.068.720.000	5.082.460.000	5.113.296.000	5.388.209.000
Sidareja	3.011.230.000	3.007.810.000	3.013.180.000	3.800.080.000	4.598.828.000
Kedungreja	3.365.660.000	3.359.740.000	3.339.690.000	3.554.596.000	3.761.416.000
Gandrungmangu	4.296.720.000	4.395.020.000	4.326.810.000	5.074.171.000	5.483.588.000
Patimuan	2.141.810.000	2.136.090.000	2.153.920.000	3.827.219.000	4.165.169.000
Cipari	3.356.160.000	3.364.120.000	3.327.060.000	4.621.870.000	5.539.258.000
Karangpucung	4.209.320.000	4.212.380.000	4.202.840.000	4.522.896.000	5.074.171.000
Cimanggu	4.554.970.000	4.544.650.000	4.562.810.000	5.500.374.000	6.131.639.000
Majenang	5.208.350.000	5.208.910.000	5.213.870.000	5.835.097.000	6.227.203.000
Wanareja	4.841.630.000	4.845.040.000	4.861.520.000	4.918.459.000	5.029.254.000
Dayeuhluhur	4.089.350.000	4.102.750.000	4.199.880.000	5.141.709.000	5.895.446.000
Kampung Laut	1.207.250.000	1.214.880.000	1.235.460.000	2.772.127.000	3.609.377.000

Sumber: Dokumen Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap (*Audited*). 2011-2015.

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dayeuhluhur	48.573	49.089	49.329	49.677	49.749
Wanareja	95.630	96.332	96.922	97.660	98.494
Majenang	126.175	126.629	127.275	127.769	128.317
Cimanggu	97.883	97.678	97.482	97.237	97.069
Karangpucung	73.018	73.214	73.422	73.642	73.825
Cipari	61.657	61.879	62.135	62.508	63.021
Sidareja	57.123	57.228	57.302	57.403	57.600
Kedungreja	80.182	81.121	80.957	81.093	81.191
Patimuan	45.535	45.841	46.211	46.223	46.348
Gandrungmangu	102.373	104.805	105.095	105.426	105.989
Bantarsari	68.940	69.096	69.387	69.484	69.613
Kawunganten	80.280	80.879	80.812	81.077	81.337
Kampung Laut	16.840	17.061	17.163	17.181	17.230
Jeruklegi	62.879	64.179	64.757	65.369	66.140
Kesugihan	96.039	95.961	96.090	96.442	96.737
Adipala	79.717	79.417	79.463	78.842	78.694
Maos	48.079	47.945	47.394	48.731	48.928
Sampang	37.269	37.521	37.574	37.660	37.797
Kroya	103.004	103.322	103.553	103.947	104.280
Binangun	65.872	66.086	66.246	66.314	66.530
Nusawungu	77.090	77.543	77.956	78.010	78.084
Cilacap Selatan	78.464	78.330	78.175	78.512	78.601
Cilacap Tengah	83.985	83.810	84.093	84.261	84.346
Cilacap Utara	68.661	69.037	69.709	70.181	70.613

Sumber: Dokumen Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap (*Audited*). 2011-2015.

Lampiran II:***Common Effect Model (CEM)***

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/18 Time: 09:47
 Sample: 1 5
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 24
 Total pool (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	817697.2	157607.0	5.188205	0.0000
X1?	-2.132965	0.540466	-3.946533	0.0001
X2?	0.339856	0.027578	12.32333	0.0000
X3?	-1.534503	1.357505	-1.130384	0.2606
R-squared	0.598647	Mean dependent var		2017869.
Adjusted R-squared	0.588267	S.D. dependent var		548422.5
S.E. of regression	351903.0	Akaike info criterion		28.41286
Sum squared resid	1.44E+13	Schwarz criterion		28.50578
Log likelihood	-1700.772	Hannan-Quinn criter.		28.45060
F-statistic	57.67414	Durbin-Watson stat		0.888912
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran III:

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/10/18 Time: 09:50

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12210201	4107617.	-2.972576	0.0038
X1?	-1.040669	0.613714	-1.695691	0.0933
X2?	0.357162	0.052619	6.787703	0.0000
X3?	173.2260	56.97643	3.040310	0.0031
Fixed Effects (Cross)				
_CS—C	3949008.			
_CT—C	-4128332.			
_CU—C	-9484801.			
_JL—C	-4339389.			
_KWT—C	-90863.17			
_BTS—C	1782596.			
_KSG—C	2960010.			
_ADP—C	-1030857.			
_MAOS—C	5071865.			
_SPG—C	-5171522.			
_KRY—C	933004.5			
_BNG—C	-1256636.			
_NSW—C	10196351			
_SDJ—C	1645973.			
_KDJ—C	-3780042.			
_GDM—C	-879331.5			
_PTM—C	4474708.			
_CPR—C	6035268.			
_KRP—C	-5262495.			
_CMG—C	792032.2			
_MJG—C	-928696.0			
_WNJ—C	-733656.9			
_DYL—C	-1952359.			
_KPL—C	1198166.			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.783911	Mean dependent var	2017869.
Adjusted R-squared	0.723499	S.D. dependent var	548422.5
S.E. of regression	288378.9	Akaike info criterion	28.17705
Sum squared resid	7.73E+12	Schwarz criterion	28.80423
Log likelihood	-1663.623	Hannan-Quinn criter.	28.43175

F-statistic	12.97609	Durbin-Watson stat	1.368988
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran IV:

Random Effect Model

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/10/18 Time: 09:54
Sample: 1 5
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	681463.7	208966.5	3.261114	0.0015
X1?	-1.760999	0.513855	-3.427033	0.0008
X2?	0.365659	0.032449	11.26890	0.0000
X3?	-1.537740	1.986351	-0.774153	0.4404
Random Effects (Cross)				
_CS—C	-195579.9			
_CT—C	-185.7677			
_CU—C	-64208.95			
_JL—C	-129119.0			
_KWT—C	-87509.58			
_BTS—C	-146280.0			
_KSG—C	80684.47			
_ADP—C	163003.9			
_MAOS—C	156092.9			
_SPG—C	165478.6			
_KRY—C	120638.0			
_BNG—C	-22889.01			
_NSW—C	200482.7			
_SDJ—C	41356.77			
_KDJ—C	111608.2			
_GDM—C	52383.30			
_PTM—C	8951.084			
_CPR—C	-210231.3			
_KRP—C	-22230.21			
_CMG—C	-358752.9			
_MJG—C	-135704.4			
_WNJ—C	64947.70			
_DYL—C	-114073.6			
_KPL—C	321137.0			
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		192446.9	0.3081	
Idiosyncratic random		288378.9	0.6919	
Weighted Statistics				

R-squared	0.580796	Mean dependent var	1123344.
Adjusted R-squared	0.569955	S.D. dependent var	458560.7
S.E. of regression	300714.2	Sum squared resid	1.05E+13
F-statistic	53.57166	Durbin-Watson stat	1.166825
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.594088	Mean dependent var	2017869.
Sum squared resid	1.45E+13	Durbin-Watson stat	0.842486

Lampiran V:***Chow Test***

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.466680	(23,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.298152	23	0.0000

Lampiran VI:***Hausman Test***

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.135987	3	0.0044